

## DAFTAR ISI EDISI 46

### PROLOG

- 4 Mempertanyakan Kebijakan Anggaran



### TOPIK EMPU

- 7 Model Alternatif Penerapan Anggaran Responsif Gender  
*Sri Mastuti*



- 19 Mengapa Perlu Anggaran Responsif Gender?  
*Dati Fatimah*
- 35 Perempuan dan Anggaran Daerah  
*Maya Rostanty dan Susana Dewi R*

- 51 *Gender Budget Analysis: Upaya Mewujudkan Keadilan Gender*  
*Rinusu*



- 65 Mengintip Perspektif Gender Dalam Dokumen APBD  
*Eko Bambang Subiyantoro*
- 85 Kebijakan Publik dan Penganggaran Tanggap Gender  
*Yuda Irlang*

### KLIPING

- 46 Alokasi Anggaran yang Berkeadilan Gender Masih Kecil dan Tidak Fokus
- 78 *Gender Budgeting*, Pelaksanaan dan Hambatannya di Sejumlah Negara
- 94 Bagaimana Mencermati Anggaran Untuk Perempuan?

Sumber foto/ilustrasi: Patmawitana, Yang Terlupakan: Menyoal Perempuan dan Anggaran, Warta Korupsi, hrdwarehouse.hsrc.ac.za, jazzandtrends.nl.jpg, essex.ac.uk

## WAWANCARA

- 96 Makhmudah  
"Anggaran Publik Seharus-  
nya Mudah Diakses dan  
Dirasakan oleh Publik"



## PROFIL

- 103 Debbie Budlender: Anggaran  
Responsif Gender, Kebijakan  
yang Realistis  
*Kamilia Manaf*

## PEREMPUAN DAERAH

- 117 Tergesernya Kepemimpinan  
Perempuan di Gorontalo  
*Verrianto Madjowa*

## RISET GENDER

- 129 Migrasi dan Relasi Gender  
pada Rumah Tangga Miskin  
*Budi Rajab*

## KOLOM BUDAYA

- 154 Cerpen

## SERBA-SERBI

- 109 Kata dan Makna  
146 Rak Buku  
164 *Glossary*  
172 Surat Pembaca  
173 Tentang Penulis

### **Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Partnership for Governance Reform in Indonesia**

Kemitraan merupakan wadah kerjasama antar Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat internasional yang bertujuan memfasilitasi terciptanya dialog serta mendukung usaha-usaha dalam mengembangkan gagasan, strategi, dan program, dalam upaya pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.

Kemitraan memiliki misi utama untuk mempromosikan pembaruan rata pemerintahan di Indonesia, di mana dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumberdaya didasarkan pada keterlibatan seluruh pihak berkepentingan [multi stakeholder approach], berfokus pada kesetaraan gender dan melibatkan kelompok-kelompok yang kurang memperoleh kesempatan [marginalized group] demi terbentuknya masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Dalam melaksanakan fungsinya Partnership menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel pada enam sektor prioritas: pembaruan hukum dan peradilan, pembaruan keamanan dan kepolisian, pembaruan pelayanan publik, pembaruan keterwakilan [representative] dan lembaga legislatif, desentralisasi dan otonomi daerah, serta inisiatif-inisiatif yang mendukung anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.